

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**METODE PEMETAAN POLITIK PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH (PILKADA) KOTA SALATIGA 2017**

Tim Pengusul :

Dr. Suwardi, M.Si. / NIDN : 0615106501 (Ketua Tim Pengusul)
Dr. Dian Esti Nurati, M.Si./ NIDN:0020105611 (Anggota Tim Pengusul)

**PROGRAM STUDI MAP PASCASARJANA
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul : Metode Pemetaan Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Salatiga 2017
1. Nama Mitra Program : Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Salatiga
 2. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Dr. Suwardi, M.Si.
 - b. NIDN : 0615106501
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - d. Program Studi : Ilmu Administrasi
 - e. Alamat Surel (e-mail) : suwardi.unisri@gmail.com
 3. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama : Dr. Dian Esti Nurati, MSi.
 - c. NIDN : 0020105611
 4. Lokasi Kegiatan (Mitra)
Wilayah : Kantor DPC PDIP Kota Salatiga
 5. Luaran yang dihasilkan : Untuk memberikan pengetahuan kepada khalayak sasaran tentang metode pemetaan politik pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Salatiga Tahun 2017.
 6. Jangka Waktu Pelaks. : 4 bulan (Pebruari s/d Mei 2016)
 7. Biaya : UNISRI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Dr. Wibowo Murti Samadi, SH, MS.
NIDN. 01020118

Surakarta, 7 Mei 2016

Ketua Tim Pengusul,

Dr. Suwardi, MSi.
NIDN. 0615106501



Menyetujui,
Ketua LPPM

Joko Pramono, S.Soś. M.Si.
NIPY. 0194.0172.

RINGKASAN

Setelah sukses menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2015, pemerintah akan menggelar pilkada serentak tahap kedua di tahun 2017. Diantara peserta pilkada serentak tahun 2017 adalah Kota Salatiga Jawa Tengah. Pilkada Kota Salatiga 2017 menjadi menarik untuk diperhatikan karena kondisi struktur dan politik masyarakat setempat.

Kota Salatiga adalah sempalan dari wilayah Kabupaten Semarang yang berubah menjadi wilayah daerah kota. Secara administrative terbagi dalam 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) Pileg 2014 berjumlah 155.237 pemilih.

Peta politik berdasarkan hasil pemilu tahun 2014 menempatkan PDI – Perjuangan memperoleh suara terbanyak sekaligus menguasai 8 kursi parlemen (DPRD) Kota Salatiga. Distribusi kursi DPRD Kota Salatiga berdasarkan hasil Pileg 2014 adalah: (1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 8 kursi (32%); (2) Partai Keadilan Sejahtera 4 kursi (16%); (3) Partai Gerindra 4 kursi (16%); (4) Partai Demokrat 3 kursi (12%); (5) Partai Golkar 2 kursi (8%); (6) Partai Kebangkitan Bangsa 2 kursi (8%); (7) Partai Persatuan Pembangunan 1 kursi (4%); (8) Partai Nasdem 1 kursi (4%).

Pemerintah Kota Salatiga dipimpin oleh Pasangan Walikota Yulinata dan Wakil Walikota Muhammad Harris. Pasangan ini diusung oleh Gabungan Partai Politik Partai Golkar, PKS, PKPI, PPP, PD. Yulianto – Haris menjabat Walikota – Wakil walikota Salatiga periode 2011 – 2016 setelah mengungguli suara pemilih pasangan Diah Sunarsasi – Teddy Sulistio yang diusung oleh PDI – Perjuangan, Partai Gerindra dan PKB.

Hasil Pilkada serentak 2015 lalu PDIP unggul dan berhasil mendudukkan calonnya menjadi Bupati – Walikota di daerah sekitar Kota Salatiga. Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kota Magelang dimenangkan oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI – Perjuangan. Oleh karena itu obsesi PDI – Perjuangan Kota Salatiga untuk memenangkan Pilkada tahun 2017 merupakan hal yang wajar. Untuk menwujudkan cita – cita memenagkan Pilkada Kota Salatiga tahun 2017 sejak awal DPC PDIP Kota Salatiga harus mampu melakukan pemetaan politik dengan baik.

DAFTAR ISI

SURAT TUGAS
No. 020/ET/UK/2016

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Analisis Situasi	1
2.1. Metode Pemetaan Politik Pilkada	1
2.2. Faktor-faktor sebagai Pertimbangan Pemilihan	3
2.3. Gambaran Pilkada di Salatiga	5
BAB II TARGET DAN LUARAN	6
BAB III METODE PELAKSANAAN	7
BAB IV HASIL YANG DICAPAI	7
BAB V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	8
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul	
2. Surat Tugas	
3. Daftar Hadir Peserta	
4. Foto Kegiatan	



YAYASAN PERGURUAN TINGGI SLAMET RIYADI SURAKARTA
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI

E-mail : info@unisri.ac.id Homepage : www.unisri.ac.id

Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Kadapiro, Surakarta Kode Pos 57136 Telp. (0271) 853839 Fax. (0271) 854670

SURAT TUGAS

Nomor : 020/RI/AK/2016

Wakil Rektor Bidang Akademik, Universitas Slamet Riyadi dengan ini menugaskan kepada :

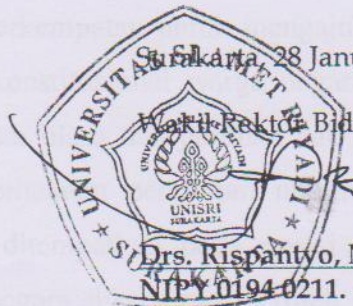
Nama : Dr. Dian Esti Nurati, M.Si.
NIP / NIPY : 19561028 198703 2001
Pangkat/Golongan : Penata / III - C
Jabatan : Lektor
Unit Organisasi : Fakultas ISIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Tugas : Pengabdian Pada Masyarakat dengan Judul : Metode Pemetaan politik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Salatiga 2017
Tempat : Kantor DPC PDI - Kota Salatiga
Hari / Tanggal : Sabtu, 06 Pebruari 2016
Lain-lain : -

Harap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan selesai melaksanakan tugas.

Surakarta, 28 Januari 2016

Wakil Rektor Bidang Akademik,

Drs. Rispantyo, M.Si.
NIPY.0194-0211.



PERNYATAAN

Tugas tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik



Unisri

BAB I. PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi.

Tahun 2015 untuk pertama kalinya Indonesia menggelar pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak terbesar. Terdapat 9 provinsi dengan 20 pasangan calon gubernur – wakil gubernur. Sebanyak 34 kota dengan jumlah pasangan wali kota - wakil wali kota 114. Wilayah daerah dengan status kabupaten 224 dengan jumlah pasangan peserta sebanyak 676 calon bupati – wakil bupati. Lagi – lagi hajatan penentuan kepala daerah baik Gubernur, Bupati / Walikota di Republik Indonesia berjalan aman, tertip, tanpa gejolak social yang berarti.

Pola rekrutmen pejabat public pemerintahan melalui system demokrasi sebagaimana sukses dilakukan selama ini akan semakin mantap dalam system dan tradisi kelembagaan negara. Hal ini penting kiranya untuk menempatkan setiap warga Negara Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memastikan hak – hak politik mereka. Warga Negara sebagai rakyat bukan hanya sebagai pemilih yang bebas tetapi memiliki hak yang sama untuk dipilih, berkesempatan yang sama dengan yang lainnya untuk dipilih sebagai pejabat negara.

Sistem demokrasi lebih mengedepankan kompetisi perebutan kekuasaan melalui dukungan dan pilih pemilih. Setiap individu berkesempatan untuk memilih secara bebas. Setiap individu berkempatan untuk mengajukan diri dan dipilih secara bebas. Negara menjamin hak konstitusional warga negaranya. Pada situasa system demokrasi dengan kebebasan luar biasa dan jaminan hak konsitusional setiap warga negara tersebut menjadikan perhelatan pemilihan umum sebagai ajang kompetisi terbuka. Rakyat atau pemilih ditempatkan pada posisi strategis akankah seorang kandidat bakal calon penjabat negara sukses memperoleh jabatan. Semua bergantung kepada seberapa banyak dukungan dan pilihan pemilih ditujukan kepada bakal calon tersebut.

2.1. Metode Pemetaan Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia dikategorikan sangat dinamis dibanding dengan Negara – Negara dunia lainnya. Bahkan banyak kalangan menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Dengan penduduk muslim terbesar Indonesia taka da yang

membantah jika di urutan pertama sebagai negara teratas. Tidak terlalu banyak Negara dengan penduduk muslim mayoritas yang sukses menjalankan pemerintahan dan system demokrasi. Beberapa Negara Timur Tengah system pemerintahan demokrasi memiliki kecendungan instabilitas, semisal Mesir, Yaman, Irak, Syiria dan sebagainya. Di kawasan Asia Tenggara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Muangthay, Vietnam, Kambojia Sistem demokrasi Indonesia jauh lebih maju.

Sukses penyelenggaraan pemilihan umum semenjak era runtuhnya rezim orde baru, menjadi katalisator perkembangan demokrasi Indonesia. Di tahun 2014 – 2015 baru system pemerintahan demokrasi Indonesia memasuki tahapan baru. Pemilihan umum legislative (pileg) 2014 yang disusul dengan pemilihan presiden berjalan damai dan lancar. Sistem pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan umum 2014 sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan posisi presiden sebagai *central of government* semakin menemukan bentuk idealnya.

Tahun 2015 untuk pertama kalinya Indonesia menggelar pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak terbesar. Terdapat 9 provinsi dengan 20 pasangan calon gubernur – wakil gubernur. Sebanyak 34 kota dengan jumlah pasangan wali kota - wakil wali kota 114. Wilayah daerah dengan status kabupaten 224 dengan jumlah pasangan peserta sebanyak 676 calon bupati – wakil bupati. Lagi – lagi hajatan penentuan kepala daerah baik Gubernur, Bupati / Walikota di Republik Indonesia berjalan aman, tertip, tanpa gejolak social yang berarti.

Kedepan pola rekrutmen pejabat public pemerintahan melalui system demokrasi sebagaimana sukses dilakukan selama ini akan semakin mantap dalam system dan tradisi kelembagaan negara. Hal ini penting kiranya untuk menempatkan setiap warga Negara Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memastikan hak – hak politik mereka. Warga Negara sebagai rakyat bukan hanya sebagai pemilih yang bebas tetapi memiliki hak yang sama untuk dipilih, berkesempatan yang sama dengan yang lainnya untuk dipilih sebagai pejabat negara.

Sistem demokrasi lebih mengedepankan kompetisi perebutan kekuasaan melalui dukungan dan pemilih. Setiap individu berkesempatan untuk memilih secara bebas. Setiap individu berkemampuan untuk mengajukan diri dan dipilih secara bebas. Negara menjamin hak konstitusional warga negaranya. Pada situasi system demokrasi dengan kebebasan luar biasa dan jaminan hak konstitusional setiap warga

negara tersebut menjadikan perhelatan pemilihan umum sebagai ajang kompetisi terbuka. Rakyat atau pemilih ditempatkan pada posisi strategis akankah seorang kandidat bakal calon pejabat negara sukses memperoleh jabatan. Semua bergantung kepada seberapa banyak dukungan dan pilihan pemilih ditujukan kepada bakal calon tersebut.

2.2. Faktor – Faktor Sebagai Pertimbangan Pemilih.

Kasus Pilkada yang memilih kepala daerah (Gubernur, Bupati/ Walikota) dipilih secara langsung semenjak diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014. Pemilihan langsung menempatkan setiap orang yang memiliki hak pilih dapat menentukan siapa saja kandidat (kepala daerah). Dari sisi pemilih, pilihan atas kontestan pilkada lebih disebabkan karena calon kepala daerah tersebut dianggap cakap dan layak berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tertentu, misalnya platform- visi, misi, program partai dan ideologi, rekam jejak kandidat, karakteristik individu kandidat, janji-janji politik, figur kandidat.

Pemilihan langsung menjadikan suara pemilih menentukan kemenangan calon. Pada konteks ini partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya menjadi sangat penting. Pemilih memiliki daya tawar yang kuat dimata partai dan kandidat. Calon kepala daerah dituntut memiliki kemampuan menarik menarik hati calon pemilih dan mampu mempengaruhi perilaku untuk menentukan pilihan. Dengan demikian, tingkat persaingan kandidat memperebutkan suara masyarakat atau pemilih menjadi tinggi.

Menjual produk politik berbeda dengan dengan menjual produk komersil. Perbedaan mendasar adalah pada konsep menjual dimana yang pemasaran politik bukanlah konsep untuk menjual partai politik atau kandidat (Calon kepala daerah) kepada para pemilih, namun, merupakan konsep yang menawarkan bagaimana istitusi partai politik atau kandidat dapat membuat program kerja yang berhubungan dengan permasalahan aktual (Firmanzah, 2012). Pemasaran politik merupakan konsep yang diintroduksi dari penyebaran ide-ide sosial di bidang pembangunan dengan meniru cara-cara pemasaran komersial, tetapi orientasinya lebih banyak pada tataran kesadaran, sikap dan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru (Cangara , 2012). Pemasaran politik merupakan sebuah konsep permanen yang harus dilakukan terus-menerus oleh partai politik atau Kandidat dalam membangun kepercayaan dan *image* publik (Buttler & Collins, 2001). Kandidat harus membangun hubungan jangka

panjang dengan calon pemilih. Kandidat juga harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mendesiminasi dan menggunakan informasi yang tepat tentang calon pemilih. Dengan demikian, kandidat harus memahami perilaku calon pemilih (*voter behaviour*).

Banyak faktor yang menjadi pertimbangan calon pemilih dalam menentukan pilihannya, antara lain citra partai, persepsi citra kandidat, dan isu politik. (Nimmo, 1999). Keputusan konsumen memilih suatu produk atau jasa menurut Hendry Assael (dalam Sutisna, 2002) dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor Pertama adalah faktor individual. Artinya pilihan untuk membeli suatu produk dengan merek tertentu (nama partai dan politisi) dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen (calon pemilih) seperti kebutuhan, persepsi terhadap karakteristik merek (nama partai dan kandidat) sikap, dan karakteristik kepribadian individu. Faktor kedua adalah lingkungan yang mempengaruhi konsumen. Artinya, pilihan konsumen terhadap calon kepala daerah juga dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya dan interaksi sosial yang dilakukan. Faktor ketiga adalah stimuli-stimuli pemasaran seperti iklan (kampanye) dan sejenisnya. Sedangkan Mowen, seperti dikutip Fimanzah (2012) mengemukakan bahwa tingkat keterlibatan konsumen (masyarakat) dalam suatu pembelian (memilih calon kepala daerah) dipengaruhi oleh kepentingan personal yang dirasakan yang ditimbulkan oleh berbagai stimulus.

Namun demikian, bukti empiris menunjukkan bahwa politik uang masih merupakan salah satu persoalan yang banyak muncul dalam pemilihan kepala daerah. Sebagian pemilih menentukan pilihannya pada kepala daerah bukan didasari pada keunggulan program dan ideologi yang ditawarkan oleh partai pengusung dan calon kepala daerah, atau rekam jejak yang dimiliki kandidat, tapi lebih kepada politik transaksional. Uang yang diberikan oleh kandidat melalui tim sukses yang dibentuk kandidat menjadi magnet yang begitu kuat dalam mempengaruhi pilihan calon pemilih. Hal ini disebabkan tidak hanya akibat persaingan yang ketat antar calon kepala daerah tapi juga disebabkan kehilangan kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Pengabdian Masyarakat ini lebih memfokuskan pada pemetaan politik perilaku pemilih menjelang pemilihan kepala daerah, khususnya yang berkaitan dengan tingat kepedulian (*awareness*) calon pemilih, partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif, popularitas dan eletabilitas kandidat, kepribadian kandidat, sumber

informasi tentang kandidat. Sedangkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang dianggap penting bagi calon pemilih yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan terhadap kandidat. Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih (*voter behaviour*), terutama berkenaan dengan faktor-faktor penting yang mempengaruhi keputusan masyarakat menentukan pilihannya terhadap calon kepala daerah, seperti tingkat *awareness*, popularitas, elektabilitas pemilih, karakter calon legislatif. Pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi calon kepala daerah beserta tim suksesnya berkenaan dengan faktor penting yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan.

2.3. Gambaran Pemilihan Kepala Daerah Di Salatiga.

Setelah sukses menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2015, pemerintah akan menggelar pilkada serentak tahap kedua di tahun 2017. Diantara peserta pilkada serentak tahun 2017 adalah Kota Salatiga Jawa Tengah. Pilkada Kota Salatiga 2017 menjadi menarik untuk diperhatikan karena kondisi struktur dan politik masyarakat setempat.

Kota Salatiga adalah sempalan dari wilayah Kabupaten Semarang yang berubah menjadi wilayah daerah kota. Secara administrative terbagi dalam 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) Pileg 2014 berjumlah 155.237 pemilih.

Peta politik berdasarkan hasil pemilu tahun 2014 menempatkan PDI – Perjuangan memperoleh suara terbanyak sekaligus menguasai 8 kursi parlemen (DPRD) Kota Salatiga. Distribusi kursi DPRD Kota Salatiga berdasarkan hasil Pileg 2014 adalah: (1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 8 kursi (32%); (2) Partai Keadilan Sejahtera 4 kursi (16%); (3) Partai Gerindra 4 kursi (16%); (4) Partai Demokrat 3 kursi (12%); (5) Partai Golkar 2 kursi (8%); (6) Partai Kebangkitan Bangsa 2 kursi (8%); (7) Partai Persatuan Pembangunan 1 kursi (4%); (8) Partai Nasdem 1 kursi (4%).

Pemerintah Kota Salatiga dipimpin oleh Pasangan Walikota Yulinata dan Wakil Walikota Muhammad Harris. Pasangan ini diusung oleh Gabungan Partai Politik Partai Golkar, PKS, PKPI, PPP, PD. Yulianto – Haris menjabat Walikota –

Wakil walikota Salatiga periode 2011 – 2016 setelah mengungguli suara pemilih pasangan Diah Sunarsasi – Teddy Sulistio yang diusung oleh PDI – Perjuangan, Partai Gerindra dan PKB.

Hasil Pilkada serentak 2015 lalu PDIP unggul dan berhasil mendudukkan calonnya menjadi Bupati – Walikota di daerah sekitar Kota Salatiga. Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kota Magelang dimenangkan oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI – Perjuangan. Oleh karena itu obsesi PDI – Perjuangan Kota Salatiga untuk memenangkan Pilkada tahun 2017 merupakan hal yang wajar. Untuk menwujudkan cita – cita memenangkan Pilkada Kota Salatiga tahun 2017 sejak awal DPC PDIP Kota Salatiga harus mampu melakukan pemetaan politik dengan baik.

BAB II. TARGET DAN LUARAN

Pemilihan langsung menjadikan suara pemilih menentukan kemenangan calon. Pada konteks ini partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya menjadi sangat penting. Pemilih memiliki daya tawar yang kuat dimata partai dan kandidat. Calon kepala daerah dituntut memiliki kemampuan menarik hati calon pemilih dan mampu mempengaruhi perilaku untuk menentukan pilihan. Dengan demikian, tingkat persaingan kandidat memperebutkan suara masyarakat atau pemilih menjadi tinggi.

Menjual produk politik berbeda dengan menjual produk komersil. Perbedaan mendasar adalah pada konsep menjual dimana yang pemasaran politik bukanlah konsep untuk menjual partai politik atau kandidat (Calon kepala daerah) kepada para pemilih, namun, merupakan konsep yang menawarkan bagaimana istitusi partai politik atau kandidat dapat membuat program kerja yang berhubungan dengan permasalahan aktual (Firmanzah, 2012). Pemasaran politik merupakan konsep yang diintroduksi dari penyebaran ide-ide sosial di bidang pembangunan dengan meniru cara-cara pemasaran komersial, tetapi orientasinya lebih banyak pada tataran kesadaran, sikap dan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru (Cangara , 2012). Pemasaran politik merupakan sebuah konsep permanen yang harus dilakukan terus-menerus oleh partai politik atau Kandidat dalam membangun kepercayaan dan *image* publik (Buttler & Collins, 2001). Kandidat harus membangun hubungan jangka

panjang dengan calon pemilih. Kandidat juga harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mendesiminasi dan menggunakan informasi yang tepat tentang calon pemilih. Dengan demikian, kandidat harus memahami perilaku calon pemilih (*voter behaviour*).

Berdasarkan target tersebut diatas maka luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Untuk memberikan pengetahuan kepada khalayak sasaran tentang metode pemetaan politik pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kota Salatiga Tahun 2017.
- 2) Memberikan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan teknis dalam melakukan pemetaan politik untuk menghadapi pilkada Kota Salatiga Tahun 2017.

BAB III. METODE PELAKSANAAN

3.1. Metode Pelaksanaan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan metode Presentasi, Ceramah dan Tanya Jawab yang disampaikan oleh Tim, audience sebagai peserta mendengarkan dan menyimak makalah yang dibagikan kepada semua peserta, kemudian dilakukan diskusi dan disusun kesimpulan-kesimpulan dari diskusi tersebut.

3.2. Khalayak Sasaran.

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah Pengurus DPC PDI – Perjuangan dan Kandidat Bakal Calon Walikota – Wakil Walikota yang akan mengikuti Pilkada Kota Salatiga melalui PDI – Perjuangan.

BAB IV. HASIL YANG DICAPAI

- 1) Berhasil memberikan pengetahuan kepada khalayak sasaran tentang metode pemetaan politik pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Salatiga Tahun 2017.
- 2) Berhasil memberikan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan teknis dalam melakukan pemetaan politik untuk menghadapi pilkada Kota Salatiga Tahun 2017.

BAB V. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Rencana tahapan berikutnya adalah melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat lanjutan dengan focus yang lebih luas, dan pada wilayah ditingkat Kabupaten dan Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemasaran politik merupakan sebuah konsep permanen yang harus dilakukan terus-menerus oleh partai politik atau Kandidat dalam membangun kepercayaan dan *image* publik . Kandidat harus membangun hubungan jangka panjang dengan calon pemilih. Kandidat juga harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mendesiminasikan dan menggunakan informasi yang tepat tentang calon pemilih. Dengan demikian, kandidat harus memahami perilaku calon pemilih (*voter behaviour*).

Obsesi PDI – Perjuangan Kota Salatiga untuk memenangkan Pilkada tahun 2017 merupakan hal yang wajar. Untuk menwujudkan cita – cita memenangkan Pilkada Kota Salatiga tahun 2017 sejak awal DPC PDIP Kota Salatiga harus mampu melakukan pemetaan politik dengan baik.

Saran

Produk politik yang dijual berbeda dengan menjual produk komersil. Perbedaan mendasar adalah pada konsep menjual dimana yang pemasaran politik bukanlah konsep untuk menjual partai politik atau kandidat (Calon kepala daerah) kepada para pemilih, namun, merupakan konsep yang menawarkan bagaimana institusi partai politik atau kandidat dapat membuat program kerja yang berhubungan dengan permasalahan actual.

Maka disarankan pemasaran politik sebagai wujud dari konsep yang diintroduksi dari penyebaran ide-ide sosial di bidang pembangunan sebaiknya meniru cara-cara pemasaran komersial, sehingga orientasinya lebih banyak pada tataran

penyadaran, sikap dan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru. Terlebih dalam kepentingan pemetaan politik dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Mirriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Drs. Chotib, 2006. *Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta. Yudhistira
- Soerjono Soekanto; 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta*
- Suhelmi, Ahmad, 2001. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Ubaedillah, A, 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group

S.1 -

1. Manajemen Pelayanan Publik
2. Manajemen Strategi Sektor Publik
3. Sistem Administrasi Negara Indonesia
4. Reformasi Birokrasi
5. Praktikum Administrasi Negara
6. Kebijakan Kerja Lapangan

KAMPUS PENDIDIKAN

	S.1	S.2	S.3
Tempat Persewaan Tinggi	Universitas Brawijaya Malang	Universitas Gadjahmada Yogyakarta	Universitas 17 Agustus Surabaya
Tempat Kerja	Administrasi Negara	Administrasi Publik	Reng Administrasi
Tahun Kerja / Status	1986 - 1991	2002 - 2005	2007 - 2013
Tempat Kerja / Tesis / Tugas	Pengantar urbanisasi pendekatan tingkat social ekonomi rumah tangga urbanisasi desa-desa	Restrukturisasi organisasi sektor pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan PP 8 Tahun 2008	Pengantar Kualitas Pelayanan terhadap keperawatan dan kegawatan Pasien ICU Kelas intensif penyakit
Tempat Penulisan / Tugas	Drs. Imant, MA	Dr. Jansari, Darwin Drs. Subarsana, MA	Prof. Dr. Hilarita, SU Prof. Dr. Rudy Handono, MA

DAFTAR HADIR PESERTA

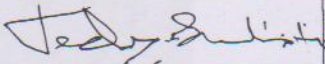
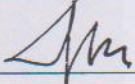
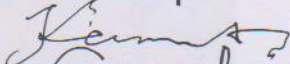
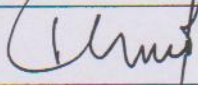

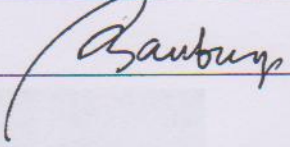
No.	Nama	Tanda Tangan
1	M. Teddy Sulisty, SE.	
2	Suniprat	
3	M. Kemat	
4	Dance Palit	
5	Supriyono	
6	Bambang Wiryawan	

FOTO KEGIATAN

